PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

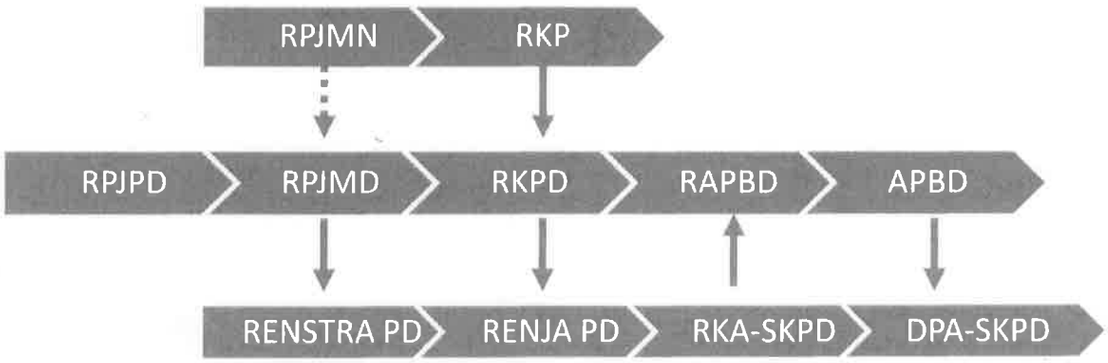
Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.

Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:
- diperhatikan
- dipedomani dan/atau diacu
- dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 4);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
36. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja BPKAD sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh BPKAD melalui capaian kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra BPKAD s/d Tahun 2023

(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023)

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD) 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5					**Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**									
5	**02**				**Bidang Urusan Keuangan**									
5	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) BPKAD**	**86**	**80**	**82**	**80**	-	**82**	-	-
5	**02**	**01**	**201**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun**	**100%**	**100%**	**100%**	**47%**	**83%**	**100%**		
5	02	01	201	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 dok	3 dok	5 dok	2 dok	40 %	5 dok		
5	02	01	201	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	3 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100 %	1 dok		
5	02	01	201	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	3 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok		
5	02	01	201	04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil	3 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok		

						koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD								
5	02	01	201	05	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 dok	1 dokumen	1 dok	1 dok	100%	1 dok		
5	02	01	201	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 laporan	6 laporan	4 laporan	4 laporan	100 %	4 laporan		
5	02	01	201	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	16 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan		
5	**02**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**100%**	**71%**	**100%**	**62%**	**85%**	**100%**		
5	02	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	138 org/bln	42 org/bl	46 org/bl	42 org/bl	90%	46 org/bl		
5	02	01	202	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan		
5	02	01	202	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	51 laporan	21 laporan	17 laporan	17 laporan	100%	17 laporan		
5	**02**	**01**	**203**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**40%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		

						Perangkat Daerah yang disusun								
5	02	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	6 laporan	3 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan		
5	**02**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat**	**100%**	**49 %**	**75 %**	**215 %**	**215%**	**100%**		
5	02	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 paket	-	-	-	-	-		
5	02	01	205	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	450 org	214 org	150 org	324 org	220%	150 org		
5	02	01	205	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	450 org	186 org	150 org	243 org	165%	150 org		
5	**02**	**01**	**206**		**Administrasi Umum**	**Persentase fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang dilaksanakan**	**100%**	**53%**	**90%**	**68%**	**76%**	**100%**		
5	02	01	206	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket		
5	02	01	206	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 paket	8 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket		
5	02	01	206	04	Penyediaan bahan logistik	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket		
5	02	01	206	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket		
5	02	01	206	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	9 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok		
5	02	01	206	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	30 laporan	7 laporan	10 laporan	10 laporan	100%	10 laporan		

5	02	01	206	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	108 laporan	70 laporan	36 laporan	36 laporan	100%	36 laporan	
5	02	01	206	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	600 dok	12 dok	200 dok	208 dok	108%	200 dok	
5	02	01	206	11	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 dok	-	2 dok	-	0%	2 dok	
5	**02**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD SKPD yang diadakan**	**100%**	**100%**	**100%**	**114%**	**114%**	**100%**	
5	02	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	345 unit	7 unit	115 unit	168 unit	146%	115 unit	
5	02	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	132 unit	23 unit	44 unit	45 unit	102%	44 unit	
5	**02**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**100%**	**100%**	**100%**	**115%**	**115%**	**100%**	
5	02	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat	9 laporan	4 laporan	3 laporan	4 laporan	125%	3 laporan	
5	02	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	108 laporan	24 laporan	36 laporan	36 laporan	100%	36 laporan	
5	02	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	
5	**02**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD SKPD yang dipelihara**	**100%**	**100%**	**100%**	**120%**	**120%**	**100%**	
5	02	01	209	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	57 unit	18 unit	19 unit	23 unit	121%	19 unit	
5	02	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	30 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	

5	02	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	30 unit	10 unit	12 unit	110%	10 unit		
5	02	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit		
5	**02**	**02**			**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan dokumen keuangan daerah sesuai Standar**	**100%**	**62%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
5	**02**	**02**	**201**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase dokumen anggaran daerah (APBD dan P. APBD) yang disusun tepat waktu**	**100%**	**84%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
5	02	02	201	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	6 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok		
5	02	02	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	6 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok		
5	02	02	201	03	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	-	-	-	-	-	-		
5	02	02	201	04	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	-	-	-	-	-			
5	02	02	201	05	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	-	-	-	-	-			
5	02	02	201	06	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	-	-	-	-	-			
5	02	02	201	07	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	6 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok		
5	02	02	201	08	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P,APBD	Jumlah Perda tentang P.APBD dan Perkada tentang Penjabaran P. APBD	15 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100%	5 dok		
5	02	02	201	09	Koordinasi dan penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-	-	-	-	-	-		

5	02	02	201	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	
5	**02**	**02**	**202**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase OPD yang mendapatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah**	**100%**	**57%**	**100%**	**71%**	**71%**	**100%**	
5	02	02	202	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	27.000 dok	7.453 dok	9.000 dok	8.948 dok	94%	9.000 dok	
5	02	02	202	03	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	624 dok	208 dok	208 dok	416 dok	200%	208 dok	
5	02	02	202	05	Koordinasi fasilitasi asistensi sinkronisasi supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah dokumen hasil koordinasi fasilitasi asistensi sinkronisasi supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	276 dok	95 dok	92 dok	92 dok	100%	92 dok	
5	02	02	202	06	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah dokumen hasil koordinasi kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank	3 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	
5	02	02	202	09	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D instansi terkait	1.950 dok	295 dok	650 dok	660 dok	110%	650 dok	
5	02	02	202	10	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban subkegiatan	Jumlah dokumen petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan	15 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100%	5 dok	

						pertanggungjawaban subkegiatan								
5	**0 2**	**0 2**	**203**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase dokumen Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun**	**100%**	**60%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
5	02	02	203	02	Rekonsiliasi dan verifikasi aset kewajiban ekuitas pendapatan belanja pembiayaan pendapatan-LO dan beban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan verifikasi aset kewajiban ekuitas pendapatan belanja pembiayaan pendapatan-LO dan beban	33 dok	18 dok	11 dok	11 dok	100%	11 dok		
5	02	02	203	03	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	12 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan		
5	02	02	203	05	Koordinasi dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Raperkada tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok		
5	02	02	203	06	Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok		
5	02	02	203	07	Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	6 dok	1 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok		
5	02	02	203	09	Penyusunan Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan		-	-	-	-	-		

						akuntansi Pemerintah Daerah								
5	02	02	203	10	Penyusunan Sistem dan prosedur akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Sistem dan prosedur akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		-	-	-	-	-		
5	02	02	203	11	Pembinaan akuntansi pelaporan dan Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi pelaporan dan Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota	450 org	104 org	150 org	155 org	110%	150 org		
5	**02**	**02**	**204**		**Penunjang Urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**Persentase penyaluran dana kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan**	**100%**	**83%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
5	02	02	204	08	Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	18 laporan	7 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan		
5	02	02	204	09	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah penyaluran dana darurat dan mendesak yang dilaksanakan	12 laporan	3 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan		
5	02	02	204	10	Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Jumlah penyaluran belanja bagi hasil Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	6 laporan	1 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan		
5	**02**	**02**	**205**		**Pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan daerah**	**Persentase OPD yang mendapatkan pembinaan implementasi SIPD**	**100%**	**58%**	**100%**	**24%**	**24%**	**100%**		
5	02	02	205	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan SIPD bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	300 org	104 org	100 org	24 org	24%	100 org		
5	**02**	**03**			**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD sesuai standar**	**100%**	**74%**	**100%**	**107%**	**107%**	**100%**		
5	**02**	**03**	**201**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase OPD yang menerapkan**	**100%**	**74%**	**100%**	**107%**	**107%**	**100%**		

						pengelolaan BMD sesuai standar								
5	02	03	201	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun	156 dok	52 dok	52 dok	52 dok	100%	52 dok		
5	02	03	201	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan BMD	156 dok	52 dok	52 dok	52 dok	100%	52 dok		
5	02	03	201	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah	3 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok		
5	02	03	201	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan BMD	156 laporan	52 laporan	52 laporan	52 laporan	100%	52 dok		
5	02	03	201	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil inventaris (LHI) Barang Milik Daerah	156 laporan	52 laporan	52 laporan	52 laporan	100%	52 laporan		
5	02	03	201	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah hasil pengamanan BMD	12 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan		
5	02	03	201	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil penilaian BMD dan hasil koordinasi penilaian BMD	90 laporan	27 laporan	30 laporan	30 laporan	100%	30 laporan		
5	02	03	201	10	Optimalisasi penggunaan pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi penggunaan pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	78 dok	50 dok	26 dok	13 dok	50%	26 dok		

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kategorisasi Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra BPKAD s/d Tahun 2023 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Ketepatan waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal penyusunan APBD	-	-
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	107%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Kerjasama Tim, Baik BPKAD, BPN dan Pemerintah Desa	-	-

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2023

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan BPKAD Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan BPKAD berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan daerah sesuai standar		Opini BPK terhadap LKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan barang milik daerah sesuai standar			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan BPKAD secara umum telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra 2024-2026.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapai Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

a. Pengelola keuangan dan aset daerah belum mempunyai pengetahuan yang memadai dalam penyusunan dokumen penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah.
b. Pemahaman terkait tupoksi dan jumlah tenaga pengelola keuangan di SKPD masih kurang, sehingga pengelola keuangan di SKPD arus merangkap tugas yang bukan menjadi tupoksinya.
c. Belum tertibnya pelaporan barang inventaris di SKPD yang perolehannya berasal dari selain APBD Kabupaten Nganjuk (Hibah, Sumbangan, dsb).
d. Sulitnya penyelesaian status kepemilikan BMD khususnya aset tanah karena pelaksanaan sertifikasi aset tetap tanah merupakan proses yang saling terkait dan harus melibatkan beberapa pihak (antara lain BPN, desa/kelurahan, kecamatan, tetangga, dan ahli waris). Hal ini, secara langsung sangat berpengaruh terhadap percepatan penyelesaian sertifikasi dan realisasi penyerapan anggaran

Tujuan Pembangunan Kabupatan Nganjuk sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2046 adalah **"MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK "** dan sasarannya adalah **"MENINGKATKAN BIROKRASI YANG AKUNTABEL DAN EFEKTIF, SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA".** Untuk itu, BPKAD mempunyai tugas dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut dengan meningkatkan tata kelola keuangan daerah dengan indikator opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.

11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi *(means of implementation)* dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.6
Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) di Kabupaten Nganjuk Sampai Tahun 2023

No.	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Catatan Penting
				Target*)	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Target 16.6: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat									
	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP		
2.	Target 17.1: Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.									
	Rasio kemandirian keuangan daerah	Persentase	17.82 %	14.23 %	14.98%	19.50 %		19.80 %		

Sumber: Hasil Evaluasi Capaian TPB Perangkat Daerah Tahun 2023

*) Rencana (anggaran setelah perubahan)

Berkenaan dengan tugas dan fungsi BPKAD memberikan kontribusi terhadap tujuan ke-16

2.3.3 Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Nganjuk, ada beberapa hal yang diharapkan oleh BPKAD dalam kurun waktu tiga tahun kedepan yaitu :

1. **Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis kinerja**

   Adanya paradigma baru dalam peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada sistem akuntansi keuangan daerah di seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah maka diperlukan adanya peningkatan sumber daya manusia yang profesional dengan integritas tinggi dalam menangani pengelolaan dan penatausahaan keuangan. Hal tersebut untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

   Diharapkan dalam tiga tahun kedepan di setiap SKPD telah terpenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia dengan latar belakang pendidikan Ekonomi terutama Akuntansi untuk mempertahankan target Pemerintah Daerah dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan mendapat opini BPK "**Wajar Tanpa Pengecualian**".

2. **Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

   Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar. Untuk mendukung terwujudnya tata kelola Barang Milik Daerah sebagai sarana dan prasarana penunjang Kinerja Pemerintah di Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan kebijakan-kebijakan strategis terkait peningkatan pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Nganjuk.

   Adapun kebijakan strategis untuk tiga tahun kedepan dalam rangka peningkatan pengelolaan barang milik daerah Kabupaten

Nganjuk yaitu peningkatan pengelolaan barang milik daerah berbasis teknologi elektronifikasi yang meliputi siklus pengelolaan barang milik daerah adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran

   Dalam hal ini mengatur mengenai rencana kebutuhan barang, rencana pemeliharaan barang, standardisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah dan standardisasi harga.

b. Pengadaan

   Dalam hal ini mengatur mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penerimaan barang yang berasal dari sumbangan dan/atau kewajiban dari pihak ketiga.

c. Penerimaan,Penyimpanan dan Penyaluran

   Dalam hal ini mengatur mengenai penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, tugas dan tanggung jawab penyimpan barang serta administrasi penyimpanan barang.

d. Penggunaan

   Dalam hal ini mengatur mengenai status penggunaan barang milik daerah baik untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi.

e. Penatausahaan

   Dalam hal ini mengatur mengenai kewajiban dan tanggungjawab Pengelola dan Kepala SKPD sebagai Pengguna dalam pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, pembukuan, inventarisasi dengan cara sensus barang daerah, cara pembuatan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris dan pembuatan Kartu Inventaris Ruangan dan Kartu Inventaris Barang serta sistem pelaporan.

f. Pemanfaatan

   Dalam hal ini mengatur mengenai pemanfaatan barang daerah melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.

g. Pengamanan dan Pemeliharaan

Dalam hal ini mengatur mengenai pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi pengamanan administrasi, fisik dan hukum serta tertib administrasi pemeliharaan barang.

h. Penilaian

Dalam hal ini mengatur mengenai penilaian barang milik daerah baik dilakukan oleh Tim maupun oleh lembaga independent bersertifikat dibidang penilaian barang milik daerah.

i. Penghapusan

Dalam hal ini mengatur mengenai penghapusan dari daftar barang pengguna dan kuasa pengguna barang serta dari daftar barang milik daerah.

j. Pemindahtanganan

Dalam hal ini mengatur mengenai pemindahtanganan sebagai tindak lanjut penghapusan meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal.

k. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Dalam hal ini mengatur mengenai pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Melakukan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Penggunaan Barang Milik Daerah pada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

l. Pembiayaan

Dalam hal ini mengatur mengenai biaya pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dan tunjangan/insentif untuk penyimpan/pengurus barang.

m. Tuntutan Ganti Rugi

Dalam hal ini diuraikan mengenai penyelesaian kerugian daerah melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi. Rencana untuk penyelesaian yang dapat ditempuh adalah pemberian sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah.

2.3.4 Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

- Belum adanya kemandirian fiskal sehingga dalam penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan masih terkendala terkait pagu anggaran daerah terutama dalam hal peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan aset daerah;
- Penguatan komitmen serta kapasitas sumber daya manusia, pengelola keuangan dan aset daerah;
- Penyusunan dan implementasi standar pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Percepatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi;
- Barang inventaris di SKPD yang belum tertib pelaporannya;
- Belum terklasternya persyaratan pengajuan sertifikat aset milik Pemda sepertiprogram PTSL ;
- Belum tertibnya persyaratan untuk pensertifikatan tanah-tanah SD yang menempati TKD;
- Membentuk Tim khusus IT mempermudah untuk koordinasi dengan bank bilamana ada gangguan teknis/jaringan SIPD;
- Adanya sosialisasi terkait produk di KKPD OPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah **"Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural".**

Proses reviu rancangan awal RKPD Tahun 2025 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut :

Tabel 2.7
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (KUA PPAS 3 JULI 2024)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Nilai SAKIP	84	8.847.339.233	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Nilai SAKIP	82	7.424.747.095	
I.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	100%	54.567.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	100%	54.567.000	
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dok	8.165.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dok	8.185.000	
2.	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok	7.639.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok	7.639.000	
3.	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	7.639.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	7.639.000	
4.	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dok	5.457.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dok	5.457.000	
5.	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dok	5.457.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dok	5.457.000	

6.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	9.276.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	9.276.000	
7.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 laporan	10.914.000	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 laporan	10.914.000	
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	6.854.428.070	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	5.419.046.661	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	46 org/bln	6.840.787.070	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	46 org/bln	5.405.405.661	
2.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan aporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	7.639.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan aporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	7.639.000	
3.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	17 laporan	6.002.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	17 laporan	6.002.000	
III.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase laporan penatausahaan BMD SKPD yang tersusun	2 laporan	7.639.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase laporan penatausahaan BMD SKPD yang tersusun	2 laporan	10.831.000	
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	2 laporan	7.639.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	2 laporan	10.831.000	
IV.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	200.531.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	200.801.950	

1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Nganjuk	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	60 orang	27.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Nganjuk	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	60	33.300.000	
2.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	150 orang	76.288.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	150 orang	76.287.950	
3.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	150 orang	97.243.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	150 orang	91.214.000	
V.	Administrasi Umum	Kab. Nganjuk	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang dilaksanakan perangkat daerah	100%	372.135.254	Administrasi Umum	Kab. Nganjuk	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang dilaksanakan perangkat daerah	100%	409.775.822	
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Nganjuk	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	6.548.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Nganjuk	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	10.218.892	
2.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Nganjuk	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	5.457.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Nganjuk	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	3.872.400	
3.	Penyediaan bahan logistik	Kab. Nganjuk	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	92.857.884	Penyediaan bahan logistik	Kab. Nganjuk	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	121.095.440	
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Nganjuk	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	32.742.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Nganjuk	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	32.742.000	
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dok	5.402.500	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dok	5.400.000	
6.	Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	10 laporan	16.371.000	Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	10 laporan	14.354.240	

7.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	187.929.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	187.264.000	
8.	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	200 dok	16.371.000	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	200 dok	26.370.950	
9.	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dok	8.458.000	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dok	8.457.900	
VI.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase BMD SKPD yang diadakan	100%	700.561.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase BMD SKPD yang diadakan	100%	313.710.773	
1.	Pengadaan Mebel	Kab. Nganjuk	Jumlah unit mebel yang disediakan	115 unit	368.413.000	Pengadaan Mebel	Kab. Nganjuk	Jumlah unit mebel yang disediakan	9 unit	27.914.000	
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	44 unit	325.148.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 unit	285.796.773	
VII.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100%	350.651.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100%	509.915.000	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat	3 laporan	4.365.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat	3 laporan	4.365.000	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	170.258.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	240.000.000	
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	176.028.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	265.550.000	
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase BMD pada SKPD yang dipelihara	100%	333.827.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase BMD pada SKPD yang dipelihara	100%	506.098.550	
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan	Kab. Nganjuk	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	19 unit	121.114.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak	Kab. Nganjuk	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	19 unit	159.824.000	

	perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan			dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan			
2.	Pemeliharaan Mebel	Kab. Nganjuk	Jumlah mebel yang dipelihara	10 unit	10.804.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Nganjuk	Jumlah mebel yang dipelihara	10 unit	10.788.500	
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	10 unit	109.140.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	10 unit	107.810.050	
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	92.769.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	227.676.000	
B	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan dokumen keuangan daerah sesuai Standar	100%	538.912.753.000	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan dokumen keuangan daerah sesuai Standar	100%	448.931.425.844	
IX	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Nganjuk	Terlaksananya penyusunan dokumen anggaran daerah (APBD dan P. APBD)	100%	1.984.441.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Nganjuk	Terlaksananya penyusunan dokumen anggaran daerah (APBD dan P. APBD)	100%	1.984.440.044	
1.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dok	444.441.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dok	444.440.730	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 dok	455.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 dok	454.999.866	
3.	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi			Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi			
4.	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi			Koordinasi Penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi			
5.	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi			Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi			
6.	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi			Koordinasi Penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi			

7.	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Nganjuk	Jumlah Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dok	470.000.000	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Nganjuk	Jumlah Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dok	469.999.897	
8.	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P,APBD	Kab. Nganjuk	Jumlah Perda tentang P. APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P. APBD	5 dok	515.000.000	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P,APBD	Kab. Nganjuk	Jumlah Perda tentang P. APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P. APBD	5 dok	514.999.901	
9.	Koordinasi dan penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran			Koordinasi dan penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	2 dok		
10.	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	208 orang	100.000.000	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	208 orang	99.999.650	
X	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Nganjuk	Terlaksananya pembinaan OPD dalam pengelolaan keuangan daerah	100%	762.361.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Nganjuk	Terlaksananya pembinaan OPD dalam pengelolaan keuangan daerah	100%	762.239.200	
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	9000 dok	364.697.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	9000 dok	364.697.000	
2.	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	208 dok	122.579.000	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	208 dok	122.579.000	
3.	Koordinasi fasilitasi asistensi sinkronisasi supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil koordinasi fasilitasi asistensi sinkronisasi supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	92 dok	78.932.000	Koordinasi fasilitasi asistensi sinkronisasi supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil koordinasi fasilitasi asistensi sinkronisasi supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	92 dok	78.810.200	

4.	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank	1 dok	37.874.000	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank	1 dok	37.874.000	
5.	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	650 dok	21.659.000	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	650 dok	21.659.000	
6.	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban subkegiatan	Kab. Nganjuk	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban subkegiatan	5 dok	136.620.000	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban subkegiatan	Kab. Nganjuk	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban subkegiatan	5 dok	136.620.000	
XI	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase dokumen Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	100%	838.850.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase dokumen Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	100%	838.850.000	
1.	Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah			Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah			
2.	Rekonsiliasi dan verifikasi aset kewajiban ekuitas pendapatan belanja pembiayaan pendapatan-LO dan beban	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan verifikasi aset kewajiban ekuitas pendapatan belanja pembiayaan pendapatan-LO dan beban	11 dok	81.050.000	Rekonsiliasi dan verifikasi aset kewajiban ekuitas pendapatan belanja pembiayaan pendapatan-LO dan beban	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan verifikasi aset kewajiban ekuitas pendapatan belanja pembiayaan pendapatan-LO dan beban	11 dok	81.050.000	

3.	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	4 laporan	96.300.000	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	4 laporan	96.300.000	
4.	Koordinasi dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dok	604.100.000	Koordinasi dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dok	604.100.000	
5.	Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dok	11.250.000	Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			
6.	Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	2 dok	11.250.000	Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	2 dok	22.500.000	
7.	Penyusunan Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah			Penyusunan Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah			
8.	Penyusunan Sistem dan prosedur akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah Sistem dan prosedur akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			Penyusunan Sistem dan prosedur akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah Sistem dan prosedur akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			
9.	Pembinaan akuntansi pelaporan dan Pertanggungjawaban	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan	150 orang	34.900.000	Pembinaan akuntansi pelaporan dan Pertanggungjawaban	54 SKPD 10 Lap	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan akuntansi pelaporan	150 orang	34.900.000	

	pemerintah Kabupaten/Kota		akuntansi pelaporan dan Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota			pemerintah Kabupaten/Kota		dan Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota			
XII	Penunjang Urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Kab. Nganjuk	Terlaksananya penyaluran dana kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100%	535.233.025.000	Penunjang Urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Kab. Nganjuk	Terlaksananya penyaluran dana kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100%	445.251.820.600	
1.	Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	6 laporan	455.346.965.000	Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	6 laporan	396.540.838.800	
2.	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	4 laporan	64.289.267.000	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	4 laporan	23.000.000.000	
3.	Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	2 laporan	15.596.793.000	Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	2 laporan	25.710.981.800	
XIII	Pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan daerah	Kab. Nganjuk	Persentase peserta yang mendapatkan pembinaan implementasi SIPD	100%	94.076.000	Pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan daerah	Kab. Nganjuk	Persentase peserta yang mendapatkan pembinaan implementasi SIPD	100%	94.076.000	
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan SIPD bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	100 orang	94.076.000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan SIPD bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	100 orang	94.076.000	
XIV	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD sesuai Standar	100%	2.250.000.000	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD sesuai Standar	100%	2.032.550.000	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Terlaksnanya penyusunan dokumen BMD	100%	2.250.000.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Terlaksnanya penyusunan dokumen BMD	100%	2.032.550.000	
1.	Penyusunan Standar Harga	Kab. Nganjuk	Jumlah standar harga yang disusun	52 dok	250.000.000	Penyusunan Standar Harga	Kab. Nganjuk	Jumlah standar harga yang disusun	52 dok	250.000.000	
2.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah rencana kebutuhan BMD	52 Dok	50.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah rencana kebutuhan BMD	52 Dok	50.000.000	

3.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dok	100.000.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dok	100.000.000	
4.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penatausahaan BMD	52 laporan	400.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penatausahaan BMD	52 laporan	500.000.000	
5.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah	52 laporan	125.000.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah	52 laporan	125.000.000	
6.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengamanan BMD	4 laporan	800.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengamanan BMD	4 laporan	502.550.000	
7.	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil penilaian BMD dan hasil koordinasi penilaian BMD	30 laporan	175.000.000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil penilaian BMD dan hasil koordinasi penilaian BMD	30 laporan	155.000.000	
8.	Optimalisasi penggunaan pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi penggunaan pemanfaatan pemindahtanganan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	26 dok	350.000.000	Optimalisasi penggunaan pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi penggunaan pemanfaatan pemindahtanganan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	26 dok	350.000.000	

Keterangan : Hasil Analisis telah dituangkan di aplikasi SIPD RI 2025

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L

Sumber: Hasil Forum Perangkat Daerah terhadap RKPD TA 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 mengangkat tema **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangasa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromarititm Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan; dan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah " Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas", adapun sasaran yang akan dicapai adalah "Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah" dan " Meningkatkan kualitas pengelolaan Aset daerah, dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah (menurut Renstra 2024)	Opini atas audit BPK	WTP
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2025**
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan dan Aset daerah sesuai standar	100%

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini. Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel (terlampir) berikut:

#TABEL PRINT OUT SIPD: MENU PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2025

3.3.1. Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2025, yaitu **"Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Sektor Unggulan Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri Dan Perdagangan Dengan Didukung Sumberdaya Manusia Dan Infrastruktur Yang Berkualitas"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender, pengendalian penduduk ,dan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk;
3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, sumber daya air, lingkungan hidup dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman;
6. Peningkatan ketahanan bencana; dan
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (*e-gov*).

Sebagai operasionalisasi strategi dan arah kebijakan pembangunan dirumuskan program Perangkat Daerah yang didalamnya mencakup program pembangunan daerah sebagai representasi 7 (tujuh) Program Unggulan Penjabat Bupati Nganjuk masa bhakti 2023-2025 yang dirangkum dengan kata "BANGKIT", yang meliputi:

1. Bangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya sayang;
2. Atasi kemiskinan ekstrem dan stunting;
3. Niatkan pengembangan potensi dan budaya daerah;
4. Genjot pertumbuhan ekonomi dan penanganan inflasi;
5. Kelola Birokrasi yang profesional dan pelayanan publik berkualitas;
6. Implementasi program sukses pemilu dan pilkada 2024;
7. Terus pembangunan infrastruktur dan layanan Masyarakat.

3.3.2. Pencapaian Target Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memberikan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, dengan target 100% (seratus persen) untuk semua jenis penerima layanan setiap tahun, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2

Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
1.	Pendidikan anak usia dini	100%
2.	Pendidikan dasar	100%
3.	Pendidikan kesetaraan	100%
4.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
5.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%
6.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
7.	Pelayanan kesehatan balita	100%
8.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%
9.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%
10.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%
11.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%
12.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%
13.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%
14.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100%
15.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	100%
16.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
17.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%
18.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100%
19.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	100%
20.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%
21.	Pelayanan informasi rawan bencana	100%
22.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
23.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
24.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
25.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%
26.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%
27.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%
28.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%
29.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100%

Sumber: Permendagri Nomor 100 Tahun 2018

3.3.3. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Upaya pencapaian target TPB/*SDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDG's* di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Visi RPD Kabupaten Nganjuk 2024-2026 adalah "Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju Adil Dan Sejahtera" yang dijabarkan ke dalam enam misi yang selanjutnya diselaraskan de ngan target TPB/*SDG's*.

Tabel 3.3

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)
Kabupaten Nganjuk

No.	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Target 2023	Pelaksana
1.	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (Tujuan 17)			
	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama			
	Jumlah kerjasama daerah yang difasilitasi	Jumlah MoU	1	BPKAD

Sumber: RAD TPB Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan fungsi keuangan.

Tabel 4.1

Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2025)
7.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Rp 445.143.449.925

Tabel 4.2

Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2025)	Alokasi (2025)
1.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Aset daerah	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan dan Aset daerah sesuai standart	100%	445.143.449.925

Tabel 4.3

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
		Uraian (Output)	Target	
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
	Keuangan			
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan asset daerah	84	7.424.747.095
I.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	100%	54.567.000

1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dok	8.185.000
2.	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok	7.639.000
3.	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dok	7.639.000
4.	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dok	5.457.000
5.	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dok	5.457.000
6.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 dok	9.276.000
7.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	3 dok	10.914.000
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	5.419.047.000
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	46 orang/bln	5.405.406.000
2.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	7.639.000
3.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan	17 laporan	6.002.000

		keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD		
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi BMD perangkat daerah	100%	10.831.000
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pentausahaan BMD pada SKPD	2 laporan	10.831.000
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	200.801.950
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	60 orang	33.300.000
2.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	150 orang	76.287.950
3.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	150 orang	91.214.000
V	Administrasi Umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang dilaksanakan perangkat daerah	100%	409.775.822
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	10.218.892
2.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	3.872.400
3.	Penyediaan bahan logistik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	121.095.440
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	32.742.000
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dok	5.400.000
6.	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	10 laporan	14.354.240
7.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	187.264.000

8.	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	200 dok	26.370.950
9.	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dok	8.457.900
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD SKPD yang diadakan	100%	313.710.773
1.	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	9 unit	27.914.000
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan	6 unit	285.796.773
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	90%	437.465.000
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat	3 laporan	4.365.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	240.000.000
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	193.100.000
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD pada SKPD yang dipelihara	100%	506.098.550
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	19 unit	159.824.000
2.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	10 unit	10.788.500
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	10 unit	107.810.050
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	227.676.000
B	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan dokumen keuangan daerah sesuai Standart	100%	435.686.152.830

IX	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen anggaran daerah (APBD dan P. APBD)	100%	1.984.440.044
1.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dok	444.440.730
2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	2 dok	454.999.866
3.	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi		
4.	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi		
5.	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi		
6.	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi		
7.	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dok	469.999.897
8.	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P,APBD	Jumlah Perda tentang P. APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P. APBD	5 dok	514.999.901
9.	Koordinasi dan penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran		
10.	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	208 orang	99.999.650
X	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya pembinaan OPD dalam pengelolaan keuangan daerah	100%	762.239.200
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	9000 dok	364.697.000
2.	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan	208 dok	122.579.000

	Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	anggaran kas dan SPD		
3.	Koordinasi fasilitasi asistensi sinkronisasi supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah dokumen hasil koordinasi fasilitasi asistensi sinkronisasi supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	92 dok	78.810.200
4.	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah dokumen hasil koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank	1 dok	37.874.000
5.	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	650 dok	21.659.000
6.	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban subkegiatan	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban subkegiatan	5 dok	136.620.000
XI	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	100%	838.850.000
1.	Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah		
2.	Rekonsiliasi dan verifikasi aset kewajiban ekuitas pendapatan belanja pembiayaan pendapatan-LO dan beban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan verifikasi aset kewajiban ekuitas pendapatan belanja pembiayaan pendapatan-LO dan beban	11 laporan	81.050.000
3.	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	4 laporan	96.300.000

	Bulanan Triwulanan dan Semesteran			
4.	Koordinasi dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dok	604.100.000
5.	Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		
6.	Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	2 dok	22.500.000
7.	Penyusunan Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah		
8.	Penyusunan Sistem dan prosedur akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan prosedur akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		
9.	Pembinaan akuntansi pelaporan dan Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan akuntansi pelaporan dan Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota	150 orang	34.900.000
XII	Penunjang Urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya penyaluran dana kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100%	432.006.547.586
1.	Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	6 laporan	382.296.560.186
2.	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana darurat dan mendesak	4 laporan	25.017.000.000
3.	Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana	2 laporan	24.692.987.400

		bagi hasil Kabupaten/Kota		
XIII	Pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan daerah	Persentase peserta yang mendapatkan pembinaan implementasi SIPD	100%	94.076.000
1.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan SIPD bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	100 orang	94.076.000
C	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD sesuai standar	100%	2.105.000.000
XIV.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen pengelolaan barang milik daerah	100%	2.105.000.000
1.	Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun	52 dok	250.000.000
2.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan BMD	52 dok	50.000.000
3.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dok	100.000.000
4.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan BMD	52 laporan	500.000.000
5.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil inventaris (LH) Barang Milik Daerah	52 laporan	125.000.000
6.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan BMD	4 laporan	575.000.000
7.	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Penilaian BMD dan hasil koordinasi Penilaian BMD	30 laporan	155.000.000
8.	Optimalisasi penggunaan pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi penggunaan pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	26 dok	350.000.000

Tabel 4.4

Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah					
	Penunjang Urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah					
	Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Belanja Bantuan Keuangan	Bantuan Keuangan Umum	382.296.560.186	264 desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Belanja Tidak Terduga		25.017.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Belanja Bagi Hasil	Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi	24.692.987.400	264 desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2025 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PJ. BUPATI NGANJUK,

SRI HANDOKO TARUNA

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Plt. KEPALA BPKAD
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN NGANJUK

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196840511 199202 2 001

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAHKAB. NGANJUK

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	8	9	10	11
						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			445.143.449.925,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			445.143.449.925,00		
	5	02				KEUANGAN			445.143.449.925,00		
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	84 Nilai	7.352.297.095,00		
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	54.567.000,00		
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	8.185.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.639.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.639.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.457.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	8	9	10	11
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.457.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9.276.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.914.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100 %	5.419.047.000,00		
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	5.405.406.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.639.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	6.002.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	8	9	10	11
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	100 %	10.831.000,00		
	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.831.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	200.801.950,00		
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	33.300.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	76.287.950,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	91.214.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dan koordinasi bagian umum yang dilaksanakan perangkat daerah	100 %	409.775.822,00		
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.218.892,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	8	9	10	11
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.872.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	121.095.440,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.742.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	14.354.240,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	187.264.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dokumen	26.370.950,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	8.457.900,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	8	9	10	11
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang diadakan	100 %	313.710.773,00		
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	27.914.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	285.796.773,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	90 %	437.465.000,00		
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	4.365.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	193.100.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD pada SKPD yang dipelihara	100 %	506.098.550,00		
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	8	9	10	11
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	159.824.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel					
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10.788.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	107.810.050,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	227.676.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan dokumen keuangan daerah sesuai standar	100 %	435.686.152.830,00		
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen anggaran daerah (APBD dan P. APBD) yang disusun tepat waktu	100 %	1.984.440.044,00		
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	444.440.730,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	454.999.866,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	8	9	10	11
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	469.999.897,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5 Dokumen	514.999.901,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	208 Orang	99.999.650,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase OPD yang mendapatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100 %	762.239.200,00		
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	9000 Dokumen	364.697.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	208 Dokumen	122.579.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	92 Dokumen	78.810.200,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	8	9	10	11
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	37.874.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	650 Dokumen	21.659.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5 Dokumen	136.620.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	100 %	838.850.000,00		
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban					
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	11 Dokumen	81.050.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4 Laporan	96.300.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	8	9	10	11
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	604.100.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah					
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	22.500.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan					
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	34.900.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya penyaluran dana kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100 %	432.006.547.586,00		
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	6 Laporan	382.296.560.186,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4 Laporan	25.017.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota					
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2 Laporan	24.692.987.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	8	9	10	11
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase peserta yang mendapatkan pembinaan implementasi SIPD	100 %	94.076.000,00		
	5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	94.076.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
3	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD sesuai standar	100 %	2.105.000.000,00		
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen pengelolaan barang milik daerah	100 %	2.105.000.000,00		
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga					
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	52 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah					
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	52 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah					
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah					
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	52 Laporan	500.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	8	9	10	11
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	52 Laporan	125.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah					
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	575.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah					
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	30 Laporan	155.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	26 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
								J U M L A H	**445.143.449.925,00**		

Plt. KEPALA BPKAD
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN NGANJUK

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196840511 199202 2 001